

**OPTIMALISASI SUMBER PENDAPATAN DAERAH: PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA****OPTIMIZING REGIONAL REVENUE SOURCE: THE IMPACT OF MOTOR VEHICLE TAX AND MOTOR VEHICLE TRANSFER FEE ON REGIONAL ORIGINAL REVENUE IN DKI JAKARTA****Alen. S. Purba^{1*}, Tesalonika², Apryana R. Situmorang³, Petra F.K. Lase⁴**^{1,2,3,4}Universitas Kristen IndonesiaE-mail: alenpurba185@gmail.com^{1*}, apryanarohani@gmail.com²,
tesalonika.gtg2005@gmail.com³, petrafebrikristianilase@gmail.com⁴**Abstrak**

Penelitian ini berupaya memahami dampak yang ditimbulkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas pendapatan daerah yang berasal secara langsung dari dalam daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2015 hingga 2024. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa realisasi penerimaan PKB, BBNKB, dan PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PKB memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. Sementara itu, BBNKB berpengaruh positif terhadap PAD dan secara simultan, PKB dan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa 72,8 persen PAD dapat dipengaruhi oleh variabel PKB dan BBNKB, sedangkan sisanya oleh variabel lain selain PKB dan BBNKB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Sehingga, optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Pendapatan Daerah.

Abstract

This study seeks to enhance understanding of the effects of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Duty (BBNKB) on the local revenue (PAD) generated within Jakarta's Special Capital Region from 2015 to 2024. The study applies a quantitative method with a descriptive approach and makes use of secondary data containing actual revenue statistics for PKB, BBNKB, and PAD collected from the provincial government of DKI Jakarta. Multiple linear regression was used to analyse the data, employing SPSS software as a tool. The findings show that, when examined separately, PKB has a beneficial but negligible influence on PAD. Meanwhile, BBNKB has a beneficial effect on PAD, and when combined with PKB, the effect is considerable. The coefficient of determination suggests that PKB and BBNKB explain 72.8 percent of the variation in PAD, with the remaining impacted by factors outside the research model. These findings suggest that the motor vehicle tax sector is critical to strengthening local fiscal capability. As a result, optimizing PKB and BBNKB collection through service digitization, ensuring taxpayer compliance, and strengthening oversight are key initiatives toward long-term PAD growth.

Keywords: *Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Registration Fee, Regional Income*

PENDAHULUAN

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan kegiatan memberikan otoritas yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola uang daerahnya secara mandiri (Panggabean, L., 2022). Dalam menerapkan kebijakannya, pemerintah daerah diharuskan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai cara untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dan meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD ialah salah satu acuan dalam menilai sejauh mana suatu daerah berhasil dalam melakukan pembangunan, memberikan layanan kepada masyarakat, serta mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh Lenny (2022) dengan salah satu sumbernya ialah pajak daerah dengan salah satu contohnya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

aktivitas ekonomi yang tinggi. Untuk tahun 2020 kuantitas kendaraan bermotor tercatat sekitar 20,22 juta unit, meningkat menjadi 20,67 juta unit pada tahun 2021, 21,05 juta unit pada tahun 2022, dan mencapai lebih dari 21,8 juta unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah kendaraan tersebut menunjukkan bahwa basis objek PKB semakin besar sehingga secara teoritis berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, peningkatan jumlah kendaraan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak kendaraan secara optimal karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai halangan, seperti tunggakan pajak kendaraan bermotor, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta fluktuasi penerimaan BBNKB akibat perlambatan penjualan kendaraan baru. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa besarnya jumlah kendaraan belum otomatis menghasilkan peningkatan PAD.

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, dimana jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan

Selain itu terdapat dinamika dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, realisasi PAD mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan akibat

perlambatan aktivitas ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024 Negeri Republik Indonesia Nomor 8 tahun terjadi pemulihan ekonomi yang 2024 Pasal 1 Nomor 4, BBNKB adalah mendorong peningkatan penerimaan pajak yang dikenakan apabila seseorang daerah, meskipun beberapa jenis pajak mengalihkan hak milik kendaraan daerah masih belum mencapai potensi bermotor, baik melalui hibah, warisan, maksimalnya. Kondisi tersebut transaksi jual beli, maupun pemasukan dari menunjukkan bahwa optimalisasi sumber- badan usaha. sumber PAD, khususnya PKB dan Penelitian mengenai dampak PKB dan BBNKB, masih menjadi tantangan penting BBNKB atas PAD terangkum dalam tabel bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 1.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD menjadi semakin relevan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD DKI Jakarta setelah diberlakukannya berbagai kebijakan perpajakan daerah dan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah dari sumber yang ada di wilayahnya sendiri, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 menyatakan Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tabel 1. Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
Rakatitha & Gayatri	2017	X = PKB, BBNKB Y = PAD	Berpengaruh positif dan signifikan
Sari et al.	2020	X = PKB, BBNKB Y = PAD	Berpengaruh signifikan
Nurhayati et al.	2023	X = PKB, BBNKB Y = PAD	PKB signifikan, BBNKB tidak signifikan
Hanifah et al.	2023	X = PKB, BBNKB, PAP Y = PAD	Berpengaruh positif
Pratama et al.	2024	X = PKB, BBNKB Y = PAD	Berpengaruh positif dan signifikan

Penelitian mengenai pengaruh PKB dan BBNKB terhadap PAD telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Namun demikian, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan inkonsistensi. Rakatitha dan Gayatri (2017), Sari et al. (2020), serta Pratama et al. (2024) menemukan bahwa PKB dan BBNKB

berpengaruh terhadap PAD. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan Nurhayati et al. (2023) menemukan bahwa data kuantitatif dalam bentuk data sekunder PKB berpengaruh signifikan sedangkan yang berasal dari penerimaan dari PKB, BBNKB tidak berpengaruh terhadap PAD. BBNKB, dan juga PAD selama periode Perbedaan hasil penelitian tersebut tahun 2015 hingga 2024 yang berasal dari menunjukkan masih terdapat *research gap* laporan tentang realisasi penerimaan pajak mengenai konsistensi pengaruh kedua jenis daerah DKI Jakarta yang merupakan pajak daerah tersebut terhadap PAD. Selain sample dari penelitian dengan jumlah 10 itu masih sedikit penelitian yang obeservasi. Penelitian menggunakan teknik menggunakan periode terbaru setelah dokumentasi melalui laporan realisasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 APBD, LKPD, Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (BPKD), BPS RI, serta berbagai Daerah (HKPD), implementasi digitalisasi peraturan perundang-undangan yang pelayanan perpajakan daerah, serta berkaitan dengan pajak daerah. Analisis berbagai kebijakan insentif kendaraan data dilakukan menggunakan listrik yang berpotensi mengubah struktur bantuan SPSS dengan menggunakan penerimaan PKB dan BBNKB. Oleh karena analisis regresi linear berganda. itu, penelitian ini mengisi kesenjangan Hipotesis dari penelitian ini adalah tersebut dengan menggunakan data sebagai berikut:
Provinsi DKI Jakarta periode 2015–2024.

METODE

Metode penelitian deskriptif dengan data kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan PKB, BBNKB yang berfungsi sebagai variabel independen, serta PAD DKI Jakarta sebagai variabel dependen selama periode penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Populasi penelitian adalah seluruh data realisasi penerimaan PKB, BBNKB, dan PAD Pemerintah

1. PKB memberikan kontribusi kepada PAD DKI Jakarta.

Peningkatan penerimaan PKB ini secara langsung akan berdampak pada peningkatan PAD karena PKB merupakan sumber utama penerimaan pajak daerah, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta yang memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakatitha & Gayatri

(2017).

H₁: Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. BBNKB memiliki berdampak atas PAD DKI Jakarta.

Penerimaan dari BBNKB sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya transaksi jual beli kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat transaksi kendaraan, maka semakin besar potensi penerimaan BBNKB, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al (2024).

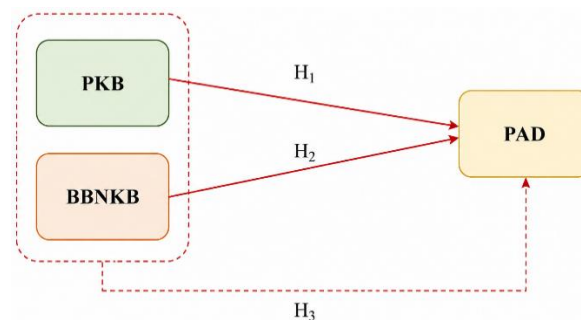
H₂ : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. PKB serta BBNKB yang diterapkan secara bersamaan memberikan pengaruh atas PAD DKI Jakarta.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan sumber pendapatan penting dan saling berhubungan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian PAD DKI Jakarta , hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al (2024) dan Rakatitha & Gayatri (2017).

H₃ : PKB dan BBNKB berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Analisis Regresi Linear Berganda

Rumus yang digunakan ialah:

$$Y = -3,207 \times 10^{13} + 3,936X_1 + 8,632X_2Y$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah setelah melakukan uji asumsi klasik dengan hasil tertera pada tabel 1 dibawah, diperoleh hasil bahwa data telah memenuhi asumsi klasik yang diprasyarkan. Hasil uji normalitas didapat data normal.

1. Pengaruh PKB terhadap PAD DKI Jakarta

Hasil yang diperoleh ialah PKB memiliki pengaruh dengan PAD. Namun, secara parsial, pengaruhnya belum signifikan, seperti yang ditunjukkan oleh uji t pada tabel 1. Variabel PKB memiliki nilai t hitung bernilai 1,124 dan tingkat signifikansi $0,298 > \alpha = 0,05$, maka hipotesis H₁ tertolak

Tabel 2. Uji T

Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t
Mode	B	Std. Error		
(Constant)	-3,21E+13	2,04E+13		-1,574
1 Pajak Kendaraan Bermotor	3,936	3,502	0,322	1,124
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8,632	4,181	0,591	2,065

Sumber: data yang diolah

Sehingga dinyatakan PKB tidak atas barang dan jasa tertentu dan juga pajak berdampak secara signifikan terhadap PAD bumi dan bangunan perdesaan dan DKI Jakarta, meskipun koefisien regresi perkotaan (PBB-P2) (Panggabean, L. menunjukkan nilai positif sebesar 3,936. 2023). Karena itu, peranan PKB terhadap Namun, peningkatan penerimaan PKB PAD belum mampu memberikan pengaruh belum berdampak secara signifikan yang dominan secara parsial.

terhadap perubahan PAD, hal ini bertolak belakang dengan seluruh hasil penelitian pada tabel 1 yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap PAD.

2. Pengaruh BBNKB terhadap PAD DKI Jakarta

Hasil analisis data menggunakan *software* SPSS menunjukkan bahwa

Kondisi tersebut memperlihatkan BBNKB berdampak positif terhadap PAD. meskipun penerimaan pajak kendaraan Bersumber dari tabel 3 di atas, BBNKB bermotor terus berkontribusi untuk PAD, memiliki nilai t hitung sebesar 2,065, akan tetapi peningkatan PKB tersebut koefisien regresi sebesar 8,632, dan nilai belum berdampak signifikan secara signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,078. langsung terhadap peningkatan PAD DKI Hal ini menunjukkan bahwa BBNKB Jakarta, yang kemungkinan disebabkan memberikan dampak positif terhadap PAD masih ada pajak kendaraan yang belum dan menjadi salah satu variabel yang dibayar, ketaatan wajib pajak yang rendah, memberikan kontribusi lebih besar serta jumlah kendaraan yang belum dibandingkan PKB, sehingga peningkatan melakukan pendaftaran ulang pajaknya penerimaan BBNKB akan diiringi oleh yang masih tinggi. peningkatan PAD dan hasil ini sejalan

Selain itu, besarnya PAD DKI Jakarta dengan hasil penelitian yang dilakukan juga dipengaruhi oleh banyak sumber penelitian terdahulu kecuali Nurhayati et al pendapatan daerah lainnya, seperti pajak (2023).

Transaksi kendaraan bermotor di DKI ialah sumber pendapatan pajak daerah yang Jakarta sangat berdampak kepada penting, terutama di perkotaan yang pendapatan daerah. Aktivitas ekonomi yang mempunyai volume transaksi kendaraan tinggi dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, seperti DKI Jakarta.

semakin besar membuat permintaan kendaraan bermotor tetap tinggi, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan BBNKB. Meskipun begitu, penerimaan BBNKB seringkali berubah-ubah karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan jumlah kendaraan bermotor yang terjual. Ketika kondisi ekonomi mulai memburuk, keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor menurun, sehingga berdampak pada pendapatan BBNKB. Hal ini selaras dengan temuan penelitian sebelumnya, dimana BBNKB membentuk PAD.

3. Pengaruh PAD dan BBNKB secara simultan terhadap PAD

PKB serta BBNKB secara simultan berdampak signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Berdasarkan tabel 4, dihasilkan F hitung senilai 9,362 dan tingkat signifikansi yang diperoleh adalah $0,011 < 0,05$, sehingga kesimpulannya PKB serta BBNKB secara simultan berdampak signifikan terhadap PAD DKI Jakarta dan kedua jenis pajak daerah tersebut merupakan bagian penting dalam PAD.

Tabel 3. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1,22E+27	2	6,11E+26	9,362	,011b
Residual	4,57E+26	7	6,53E+25		
Total	1,68E+27	9			

Sumber: data yang diolah

Sehingga dapat dinyatakan kedua variabel tersebut berkontribusi bersama dalam menaikkan PAD DKI Jakarta. PKB bermotor dan ini menghasilkan hasil yang dapat dikatakan merupakan sumber sama dengan penelitian terdahulu kecuali pendapatan daerah yang signifikan karena kuantitas kendaraan bermotor di Jakarta semakin bertambah banyak setiap tahunnya dan dapat memberikan ide bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dengan cara

Nurhayati et al (2023). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh adalah 0,728, membuktikan variabel PKB dan BBNKB mampu menjelaskan perubahan PAD sebesar 72,8%, termasuk dalam kategori kuat,

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh secara lebih komprehensif.

variabel selain yang digunakan dalam **REFERENSI**

penelitian ini. PKB memiliki peran penting dalam membantu kemampuan keuangan suatu daerah dan juga dapat mendanai berbagai proyek pembangunan di daerah tersebut. Pengelolaan PKB secara optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD secara persisten sekaligus memperkuat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan optimalisasi penerimaan PKB dengan cara eskalasi kepatuhan wajib pajak, digitalisasi pembayaran, pepadanan basis data kendaraan, dan tidak lupa melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menunggak pajak. Di sisi lain, penerimaan BBNKB perlu dipertahankan melalui kebijakan yang mampu menjaga pertumbuhan sektor otomotif tanpa mengurangi potensi penerimaan daerah. Bagi penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PBB-P2, tingkat kepatuhan wajib pajak, pertumbuhan ekonomi, atau jumlah kendaraan bermotor sehingga model penelitian mampu menjelaskan variasi PAD

Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air

Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Wilayah (PPPDW) Kota

Sukabumi. *Akuntoteknologi* :

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi, 15(2), 48–60.

<https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.247>.

Indonesia (2025). Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKDP)DKI Jakarta.

<https://dashboard-bpkd.jakarta.go.id/transparansi/index/view/?id=35>.

Lenny, L. (2022). Penentu pendapatan asli

daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4),1640-1646.

<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2270>.

Nurhayati, S., Fitrawansyah, F., & Riyanto,

D. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap

- Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25970–25981. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3588>.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10782>. Rakatitha & Gayatri (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *Wahana Inovasi*. 10(1), 172-178. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p26>.
- Pareira. F. (2024). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kaitannya Dengan Pajak Daerah Kabupaten Lembata. *Helfin Journal*. 1(1). 19 -26. <https://doi.org/10.33541/helfin.v1i1.5346>.
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota terhadap penerimaan pajak daerah (Studi kasus: Provinsi DKI Jakarta 2017-2022). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(2), 200-220. <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4474>.
- Panggabean, L. (2022). Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 5(2), 1102-1109. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1970>.
- Pratama, Warisi, dan Alie (2024) Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25970–25981. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i5.3588>.
- Sihombing, et,al (2025). Peran Cukai Hasil Tembakau Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara : Kontribusi Penerimaan Cukai dan Pajak. *Helfin Journal*. 2(1). 196-208. <https://doi.org/10.33541/helfin.v2i1.6371>.
- Yuanitha, M., & Karundeng, M. L. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Terhadap Penerimaan Peningkatan Pendapatan. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 3523-3532. <https://doi.org/10.52644/joeb.v2i6.740>.
- Yudhita Pramita Sari, C. ., Priono, H., & Diah Widayantie, T. . (2023). Pengaruh

Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Terhadap Kimerja
Dengan Pendapatan Asli Daerah
Sebagai Variabel Intervening. Jurnal
Mebis (Manajemen Dan
Bisnis), 5(1), 24–30.
<https://doi.org/10.33005/mebis.v5i1.9>
8.